



RAPAT KOORDINASI
PENGENDALIAN INFLASI DAERAH
BERSAMA
MENTERI DALAM NEGERI
Selasa, 19 Agustus 2025

TPID KOTA BANJARBARU
TAHUN 2025

UNDANGAN RADIOGRAM



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

FORMULIR BERITA

Register No :

PANGGILAN	JENIS	NOMOR	DERAJAT
DARI : MENTERI DALAM NEGERI			
UNTUK : YTH. 1. GUBERNUR SELURUH INDONESIA 2. BUPATI GARING WALI KOTA SELURUH INDONESIA			
TEMBUSAN : YTH. MENTERI DALAM NEGERI			

KLASIFIKASI : SANGAT SEGERA
Nomor : 500.2.3/4578/SJ

DALAM RANGKA PENGENDALIAN INFLASI TAHUN 2025 KMA AKAN DILAKS RAPAT KOORDINASI KURBUK RAKOR KURTUP YG DIRANGKAIKAN DGN PEMBAHASAN EVALUASI DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PROGRAM 3 JUTA RUMAH TTK SEHUB DGN HAL TSB KMA DGN INI DISAMPAIKAN HALS SBB TTK DUA

AAA TTK RAKOR DIMAKSUD DILAKS SCR *ONLINE* PD HARI SELASA TGL 19 AGUSTUS 2025 PKL 08.00 WIB SD SELESAI MELALUI APLIKASI *ZOOM MEETING* DGN *MEETING ID 677 057 3756* PASSWORD INFLASI KMA DGN FORMAT PENULISAN AKUN NAMA DAERAH GARING INSTANSI_JABATAN_NAMA PEJABAT KMA SERTA KANAL *YOUTUBE* KEMENDAGRI RI KMA YG DIPIMPIN OLEH MENTERI DALAM NEGERI TTK KMA

BBB TTK AGENDA RAKOR DIMAKSUD TERDIRI DARI PEMBAHASAN LANGKAH KONKRET PENGENDALIAN INFLASI DI DAERAH TAHUN 2025 DAN EVALUASI DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PROGRAM 3 JUTA RUMAH TTK KMA

CCC TTK BERKENAAN DGN HURUF AAA KMA DIMINTA KPD TTK DUA

SATU TTK GUBERNUR SELURUH INDONESIA UTK HADIR SCR *ONLINE* BERSAMA KAPOLDA KMA PANGDAM GARING DANREM KMA KAJATI KMA SEKDA PROV KMA INSPEKTUR DAERAH PROV KMA INSPEKTUR KODAM KMA KA BAPPEDA KMA PIMWIL BULOG PROV KMA KADIN DAN KA PERANGKAT DAERAH YG MEMBIDANGI URUSAN PERTANIAN KMA KETAHANAN PANGAN KMA PERDAGANGAN KMA KEUANGAN KMA ESDM KMA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN STATISTIK TTK KMA

DUA TTK BUPATI GARING WALI KOTA SELURUH INDONESIA UTK HADIR SCR *ONLINE* BERSAMA KAPOLRESTABES KMA DANDIM KMA KAJARI KMA SEKDA KAB GARING KOTA KMA INSPEKTUR DAERAH KAB GARING KOTA KMA KA BAPPEDA KMA PIMCAB BULOG KAB GARING KOTA KMA KADIN DAN KA PERANGKAT DAERAH YG MEMBIDANGI URUSAN PERTANIAN KMA KETAHANAN PANGAN KMA PERDAGANGAN KMA KEUANGAN KMA ESDM KMA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN STATISTIK TTK KMA

TIGA TTK GUBERNUR DAN BUPATI GARING WALI KOTA AGAR MENYIAPKAN PAPARAN TENTANG KONDISI PERGERAKAN HARGA KMA KENDALA YANG DIHADAPI DAN UPAYA YANG DILAKUKAN DALAM MENGENDALIKAN INFLASI DI MASINGS DAERAH TTK KMA


EMPAT TTK DAERAH PROVINSI DAN KABUPATEN GARING KOTA YANG AKAN PAPARAN KMA AKAN DIINFORMASIKAN LEBIH LANJUT TTK KMA

LIMA TTK GUBERNUR DAN BUPATI GARING WALI KOTA SELURUH INDONESIA MEMAKAI *DRESS CODE* PDH KHAKI DAN TANDA PANGKAT SERTA TANDA JABATAN TTK KMA

DDD TTK UTK INFORMASI LEBIH LANJUT DPT MENGHUB DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH KEMENDAGRI UP DIREKTORAT SUPD III KMA MELALUI SDR IMANUEL 082118800730 DAN SDRI NADIA 081343047244 TTK KMA

EEE TTK DUM TTK HBS

TANGGAL PEMBUATAN 15 Agustus 2025

Pengirim : a.n. MENTERI DALAM NEGERI SEKRETARIS JENDERAL	No. Kode	Waktu/pukul		Lalu Lintas	Paraf Operator
Nama :  Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik oleh : Sekretaris Jenderal Tomsis Tohir		Terima	Kirim		
Tanda Tangan :					

DAFTAR HADIR

DAFTAR HADIR

Acara :
 Hari/Tanggal :

NO	NAMA	INSTANSI/SKPD	L/P	TANDA TANGAN
1	SRI LAILANA	Asisten 2	P	1
2	FADY LURAHMAN	ky Eko > SD	L	2
3	DIAN FURTA ASTRI	BAG ELGSDA	P	3
4	Juani Arus			4
5	Agus Muslim	BPS Kota Bjb	L	5
6	Fitriyani	DISDA Pkn	L	6
7	Hendra	DISTOP	L	7
8	Purba N.S.	INSPEKSI	L	8
9	Indra	Eko SDA		9
10	Siti Fauziah	Bapperida		10
11	Ikran. Zain	Bapperida	P	11
12	Restu	Bapperida	P	12
13	REFFIGA AGUSBANS	Bapperida		13
14	Endah M	DKP3	P	14
15	Noor Effendi	BAPPERIDA	L	15
16	Noormilawati	Wepelhorst	P	16
17	M. Fachlep	PEP3	L	17
18	Gairanin	DINDASPERI	L	18
19	Arief R.H	BPKAD	C	19
20	Hadis	DKP3		20

NOTULEN RAPAT



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU SEKRETARIAT DAERAH

Alamat Kantor : Jalan. Panglima Batur Nomor 1 Banjarbaru Kalsel Telp. (0511) 477256

NOTULEN RAPAT KOORDINASI TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH

- I. Dasar : Radiogram Menteri Dalam Negeri Nomor: 500.2.3/4578/SJ Tanggal 15 Agustus 2025
- II. Maksud dan Tujuan : Pembahasan Langkah Konkret Pengendalian Inflasi di Daerah Dalam Rangka Pengendalian Inflasi Tahun 2025
- III. Peserta :
 1. Menteri Dalam Negeri
 2. Tim Pengendalian Inflasi Daerah Seluruh Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Indonesia
- IV. Waktu dan Tempat : Selasa, 19 Agustus 2025 pukul 09.00 WITA
Via *Zoom Meeting* yang dilaksanakan di Aula Srikandi Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru
- V. Hasil :
 1. **BADAN PANGAN NASIONAL**
 - a) Aksi strategis Badan Pangan Nasional Tahun 2025
 - Realisasi serap gabah/beras sebanyak 2,82 juta ton setara beras
 - Penguatan cadangan beras pemerintah (CPP per 15 Agustus 2025 sebanyak 3,91 juta ton)
 - Penyaluran beras SPHP (realisasi tahun 2025 sebanyak 215,9 ribu ton)
 - Penyaluran bantuan pangan tahun 2025 (10 kg beras per bulan kepada 18,3 juta KPM selama 2 bulan Juni-Juli)
 - Gerakan pangan murah (GPM) tahun 2025 terlaksana sebanyak 6.508 kali di 308 kab/kota dan 35 provinsi.
 - Panel harga pangan selalu up to date (terdapat 1.053 enumerator yang setiap hari akan melaporkan harga terupdate di lapangan).
 - Kios pangan sebanyak 1.448 unit yang tersebar di 33 provinsi dan 118 kab/kota.
 - Pemanfaatan sarana dan prasarana rantai dingin (2022-2024) (terdapat 42 sarpras)
 - Pemanfaatan sarana dan prasarana keamanan dan mutu pangan (sudah terdapat 17 mobil laboratorium keliling untuk pengawasan keamanan pangan pada tahun 2024)
 - Gerakan stop boros pangan serta penyelamatan pangan (gerakan ini untuk mengurangi food loss dan food waste)
 - B2SA go to school/pesantren, rumah pangan B2SA di desa, pengembangan usaha pengolahan pangan lokal di 34 lokasi
 - Sinergi perumusan standar dan pengawasan keamanan pangan segar
 - Intervensi pengendalian kerawanan pangan di 8 provinsi 20 kota 45.000 kepala keluarga dan aksi kesiapsiagaan pangan di 4 provinsi
 - b) Aksi ketika harga mengalami inflasi
 - Fasilitasi Distribusi Pangan atau Kerjasama Antar Daerah
 - Gerakan Pangan Murah atau Operasi Pasar Murah
 - Penanaman atau produksi: contoh tanam cabai di pekarangan atau rumah pangan lestari
 - Penguatan CPPD
 - Penyaluran CPPD
 - Kios Pangan atau Hub Pangan

NOTULEN RAPAT (Lanjutan)

- Pemanfaatan pangan lokal pengganti bahan pangan yang mengalami deficit
- c) Aksi ketika harga mengalami deflasi
 - Bela beli produk petani/peternak
 - Fasilitasi penyaluran ke horeka
 - Fasilitasi penyaluran bahan baku pengolahan hasil produksi ke industry olahan pangan
 - Fasilitasi melalui mekanisme penyaluran bantuan pangan

2. BADAN PUSAT STATISTIK

- a) Inflasi tahun kalender Juli 2025 adalah sebesar 1,69% (IHK Juli 2025 dibandingkan IHK Desember 2024)
- b) Selama Januari-Juli 2025, Indonesia telah mengalami tiga kali deflasi bulanan pada Januari, Februari dan Mei, serta empat kali inflasi bulanan pada Maret, April, Juni dan Juli.
- c) Inflasi bulanan tertinggi terjadi pada Maret 2025 sebesar 1,65% dan deflasi bulanan terdalam terjadi pada Januari 2025 sebesar 0,76%
- d) Inflasi tahunan pada Juli 2025 sebesar 2,37%
- e) Komoditas makanan yang paling sering menyumbang andil inflasi Januari – Juli 2025 adalah beras, tomat, bawang merah, dan cabai rawit.
- f) Komoditas makanan yang paling sering menyumbang andil deflasi Januari – Juli 2025 adalah cabai merah dan bawang putih.
- g) Pada M2 Agustus 2025, tercatat 14 provinsi mengalami kenaikan IPH, sementara 22 provinsi mengalami penurunan dibandingkan bulan sebelumnya. Adapun 2 provinsi tercatat relatif stabil. Komoditas penyumbang andil kenaikan IPH di 14 Provinsi yang mengalami kenaikan IPH adalah cabai merah, bawang merah, dan beras.
- h) Secara nasional, jumlah Kabupaten/Kota yang mengalami penurunan IPH pada M2 Agustus 2025 lebih banyak dibandingkan Kabupaten/Kota yang mengalami kenaikan IPH.
- i) Kenaikan IPH tertinggi di luar pulau Jawa dan Sumatera terjadi di Kab. Bantaeng dengan nilai perubahan IPH 1,99%. Komoditas penyumbang andil kenaikan IPH terbesar di 10 wilayah tersebut didominasi oleh cabai rawit, cabai merah dan beras.

3. BULOG

- a) Total realisasi SPHP Juli s.d Desember 2025 sebesar 38.811 ton. Dengan realisasi tertinggi yaitu Prov. Jatim.
- b) Aksi dan strategi penjualan beras SPHP:
 - Sinergi dengan TNI/POLRI, Pemda, KDMP & BUMN Pangan lain
 - Program canvassing oleh seluruh karyawan BULOG
 - Penyaluran ritel modern SPHP beras
 - Penjualan beras di setiap gudang
- c) Realisasi distribusi minyakita per tanggal 15 Agustus 2025 sebanyak 58.735.042 liter dengan distribusi tertinggi pada bulan Maret 2025 sebanyak 10.679.036 liter yang bertepatan pada momen Ramadan.
- d) Terhadap sisa stok Minyakita yang tersedia di Perum BULOG selanjutnya akan dilakukan penjualan ke jaringan Distributor (D2) maupun jaringan ritel (RPK/Pedagang pengecer di pasar pantauan SP2KP/toko pengecer lainnya)

4. JAKSA AGUNG MUDA PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA

- a) Kejaksaan menegaskan bahwa fungsi hukum adalah instrument penting untuk menjaga kepastian, stabilitas, dan keadilan harga serta melindungi

NOTULEN RAPAT (Lanjutan)

Masyarakat dari praktik yang tidak sehat dalam mekanisme pasar.

- b) Peran Kejaksaan diperlukan dalam Pendampingan Hukum, pengawasan dan pencegahan potensi penyimpangan guna memastikan program berjalan efektif, efisien, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c) Program percepatan Pembangunan 3 (tiga) juta rumah merupakan bagian dari strategi nasional untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menyediakan hunian layak bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan menjaga stabilitas sosial-ekonomi
- d) Rekomendasi dari Jamdatun terhadap Pemerintah Daerah:
 - Program Stabilisasi dan Bantuan Pangan harus dilakukan secara transparan, akuntabel dan tepat sasaran. Kejaksaan siap mengawal dan memberikan pendampingan hukum agar tidak terjadi penyalahgunaan anggaran, praktik korupsi atau penyimpangan distribusi yang berpotensi menambah tekanan inflasi di daerah.
 - Dukungan Pemerintah Daerah dalam Program 3 juta rumah tidak hanya fokus pada percepatan Pembangunan tetapi juga penting memperhatikan kepastian hukum, transparansi pemanfaatan aset, pencegahan penyimpangan anggaran serta perlindungan konsumen dan Masyarakat berpenghasilan rendah

5. KEMENTERIAN PERDAGANGAN

- a) Berdasarkan data SP2KP per 15 Agustus 2025, terjadi kenaikan harga beras medium dan premium di sebagian besar wilayah. Tercatat seluruh provinsi berada di atas HET medium, sementara tercatat 37 provinsi berada diatas HET premium.
- b) Pemerintah melalui BAPANAS telah memberikan penugasan kepada Perum BULOG untuk melaksanakan SPHP Beras dengan target penyaluran 1.318.826 ton dari 8 Juli sd 31 Desember 2025
- c) Dukungan peran Pemda guna mendorong perdagangan komoditas antar wilayah:
 - Perlunya mapping data dan informasi komoditas (sentra produksi dan kebutuhan masing-masing wilayahnya).
 - Mendorong optimalisasi komoditas potensial di wilayahnya.
 - Melakukan inisiasi – inovasi dalam mengoptimalkan peran BUMD, Koperasi dan/atau pembinaan terhadap mitra pelaku usaha sebagai off taker.
 - Memberikan dukungan alokasi anggaran.
 - Pemanfaatan sarana perdagangan dan kolaborasi program Pemerintah guna efisiensi distribusi.
 - Menginisiasi kegiatan temu usaha antara wilayah sentra produksi dan sentra konsumsi untuk melaksanakan perdagangan komoditas antar wilayah.
 - Kerja Sama Perdagangan Komoditas Antar Wilayah perlu diarahkan pada tujuan membantu Pemerintah - Pemda dalam menjaga ketersediaan-pasokan komoditas barang kebutuhan pokok, stabilitas harga, mengurangi disparitas harga serta mendukung pengendalian inflasi.
 - Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap realisasi KAD khususnya komitmen pelaku usaha yang terlibat

6. KEMENTERIAN PERTANIAN

- a) Guna memperkuat ketahanan & kemandirian pangan, agar setiap daerah mampu secara mandiri memenuhi kebutuhan/konsumsi, dg berdayakan

NOTULEN RAPAT (Lanjutan)

- petani, tingkatkan produksi, membangun skala kawasan sentra, membangun sistem logistik, memperlancar distribusi, pasar
- Guna mencukupi kebutuhan secara mandiri cabai rawit per tahun, prov Lampung menambah tanam 5.260 ha, Banten 4.813 ha, Sumsel 2.734 ha, Riau 2,137 ha, Jabar 1.421 ha, Kaltim 987 ha, Sulut 750 ha, Kepri, 674 ha, Papua Pegunungan 542 ha, Kalbar 482 ha, dan lainnya
 - Pemenuhan cabai merah secara mandiri, per tahun Banten menambah tanam 5.798 ha, Riau 5.303 ha, DKI Jakarta 4.607 ha, Sumsel 3.817 ha, Sumut 2.014 ha, Lampung 1.353 ha, Kepri 1.007 ha, dan lainnya.
 - Bagi provinsi defisit bawang merah, agar menambah tanam per tahun Banten 3.543 ha, DKI Jakarta 3.200 ha, Lampung 3.179 ha, Riau 2,716 ha, Sumsel 2.660 ha, Kaltim 1.330 ha, Kalsel 1.277 ha, Kalbar 1.175 ha, dan lainnya.
 - Bagi provinsi defisit telur ayam ras dan daging ayam ras, agar dapat dilakukan dengan memindahkan atau menyalurkan provinsi surplus ke provinsi defisit yang diikuti tanam jagung, tanam jagung dan memproduksi telur dan ayam secara bertahap mandiri
 - Progres tambahan luas tanam cabai dan bamer serta ayam agar dilaporkan secara periodik bulanan.
 - Bagi provinsi surplus pangan sdh mulai bertahap hilirisasi produk dan ekspor
 - BMKG pantau curah hujan dan kini sebagian wilayah memasuki musim kemarau pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara, dan Sumatera
 - Sukseskan program Optimalisasi lahan rawa, cetak sawah, sinergi irigasi PUPR, mekanisasi, benih unggul, KUR, subsidi pupuk, brigade pangan, sinergi irigasi PUPR, program tanam padi dan jagung Bersama TNI, Polri, Kemdagri, Kemendes, Kementransm K/L terkait

7. KANTOR STAF PRESIDEN

- Rangkuman hasil pemantauan: status harga pangan strategis (update data per 15 Agustus 2025)

		DISPARITAS HARGA ANTAR DAERAH		
		Rendah	Sedang	Tinggi
STATUS HARGA	Aman	Kedelai	Daging Sapi	Cabai Rawit Merah, Cabai Merah Keriting
	Waspada	-	Gula Pasir Curah	Telur Ayam Ras, Daging Ayam Ras
	Tidak Aman	Minyakita	-	Beras Medium (Zona 1), Beras Medium (Zona 2), Beras Medium (Zona 3), Bawang Merah, Bawang Putih, Jagung Tk Peternak

NOTULEN RAPAT (Lanjutan)

- b) Rangkuman Kabupaten/Kota yang Masuk Peringkat 10 Harga Tertinggi selama Seminggu Terakhir (update data per 15 Agustus 2025)

Kabupaten/Kota	Jumlah Komoditas	Komoditas
Kab. Puncak Jaya	8	Bawang Merah, Bawang Putih, Beras Medium, Cabai Merah Keriting, Gula Pasir Curah, Minyakita, Telur Ayam Ras, Daging Sapi
Kab. Puncak	6	Bawang Merah, Beras Medium, Cabai Rawit Merah, Daging Ayam Ras, Gula Pasir Curah, Telur Ayam Ras
Kab. Intan Jaya	6	Bawang Merah, Bawang Putih, Beras Medium, Cabai Rawit Merah, Daging Ayam Ras, Telur Ayam Ras
Kab. Pegunungan Bintang	6	Bawang Merah, Beras Medium, Daging Ayam Ras, Gula Pasir Curah, Minyakita, Daging Sapi
Kab. Nduga	6	Bawang Merah, Bawang Putih, Cabai Merah Keriting, Cabai Rawit Merah, Daging Ayam Ras, Gula Pasir Curah
Kab. Mappi	6	Beras Medium, Cabai Merah Keriting, Cabai Rawit Merah, Daging Ayam Ras, Minyakita, Telur Ayam Ras
Kab. Tolikara	5	Bawang Putih, Beras Medium, Gula Pasir Curah, Minyakita, Telur Ayam Ras
Kab. Lanny Jaya	3	Bawang Merah, Gula Pasir Curah, Minyakita
Kab. Mamberamo Raya	3	Bawang Putih, Daging Ayam Ras, Gula Pasir Curah
Kab. Jayawijaya	3	Beras Medium, Gula Pasir Curah, Telur Ayam Ras
Kab. Boven Digoel	3	Cabai Merah Keriting, Cabai Rawit Merah, Telur Ayam Ras
Kab. Merauke	3	Cabai Merah Keriting, Telur Ayam Ras, Kedelai
Kab. Maybrat	2	Bawang Putih, Minyakita
Kab. Dogiyai	2	Bawang Putih, Cabai Rawit Merah
Kab. Dajuyai	2	Bawang Putih, Cabai Rawit Merah
Kab. Yalimo	2	Beras Medium, Gula Pasir Curah
Kab. Kepulauan Aru	2	Cabai Merah Keriting, Cabai Rawit Merah
Kab. Paniai	2	Cabai Merah Keriting, Daging Ayam Ras
Kab. Pegunungan Arfak	2	Daging Ayam Ras, Minyakita
Kab. Waropen	2	Daging Ayam Ras, Minyakita
Kab. Mamberamo Tengah	2	Gula Pasir Curah, Telur Ayam Ras
Kab. Konawe Selatan	2	Kedelai, Jagung Tk Peternak
Kab. Karimun	2	Jagung Tk Peternak, Daging Sapi

- c) Cadangan pangan pemerintah daerah (CPPD) Kab dan Kota
- Per Juni 2025, total stok CPPD kab dan kota sebanyak 13.409,42 ton
 - Dari 38 Provinsi di Indonesia, tercatat 32 Provinsi telah menyelenggarakan kegiatan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD). Sementara itu, 6 Provinsi lainnya belum menjalankan kegiatan tersebut, yaitu Provinsi Maluku, Papua Tengah, Papua Barat Daya, Papua Selatan, Papua Pegunungan dan DKI Jakarta
 - Dari 514 Kabupaten/Kota, tercatat 322 Kabupaten/Kota yang sudah memiliki stok CPPD, sedangkan 192 Kabupaten/Kota belum memiliki CPPD

8. KEMENTERIAN DALAM NEGERI

- a) Inflasi Indonesia berada pada peringkat ke-77 dari 186 negara di dunia dan peringkat ke-8 dari 11 negara di ASEAN.
- b) Arahan dan penekanan dalam pengendalian inflasi yaitu:
- Secara konsisten melaksanakan Rapat Koordinasi atau Anev Pengendalian Inflasi Daerah sesuai dengan arahan Bapak Presiden RI.
 - Memastikan ketersediaan stok/pasokan secara rutin serta melakukan analisis prediksi kenaikan/penurunan harga bahan pangan pokok. Pemantauan harga dan stok untuk memastikan kebutuhan tersedia, serta melakukan pengecekan lapangan/pasar
 - Perlu lebih merinci jenis komoditas yang mengalami kenaikan dan penurunan harga per hari dan mingguan. Perlu menetapkan target penurunan harga komoditas yang diatas Harga Eceran Tertinggi (HET). Melakukan Rekonsiliasi data, mengintegrasikan data-data baik yang ada di Kementerian Pertanian, Badan Pangan, Bulog, Kementerian Perdagangan maupun di Daerah agar data yang direkonsiliasi betul-betul bisa kita mengintervensi secara tepat.
 - Pemda agar mengalokasikan anggaran untuk mengendalikan inflasi dengan memanfaatkan Belanja Tidak Terduga (BTT)
 - Melakukan langkah yang lebih proaktif, konkrit dan cepat dalam pengendalian inflasi daerah, berbasis data dengan berkoordinasi dengan Badan Pusat Statistik dan Bank Indonesia setempat serta memperhatikan hasil Indeks Perkembangan Harga (IPH) mingguan
- c) Arahan dan penekanan dalam pertumbuhan ekonomi yaitu:
- Pemda diminta melakukan pemantauan berkala atas kinerja

NOTULEN RAPAT (Lanjutan)

pertumbuhan ekonomi dengan berkoordinasi bersama BPS dan K/L terkait, serta menyusun strategi mitigasi terhadap risiko perlambatan ekonomi. Langkah korektif harus dilakukan cepat jika terjadi tekanan terhadap indikator ekonomi makro daerah.

- Pemda harus mendorong kemudahan perizinan melalui Mal Pelayanan Publik (MPP) dan sistem OSS (Online Single Submission), menciptakan iklim investasi yang ramah dan kompetitif, serta melakukan promosi potensi ekonomi daerah kepada investor nasional maupun internasional.
- Pemerintah Daerah diminta untuk memperkuat sektor produktif melalui hilirisasi hasil pertanian, perkebunan, perikanan, dan industri kreatif lokal, serta memberikan dukungan penuh kepada UMKM melalui pembinaan, akses pembiayaan, digitalisasi usaha, dan pelatihan kewirausahaan.
- Pemerintah Daerah diminta untuk menyelaraskan program-program peningkatan ekonomi ke dalam dokumen perencanaan seperti RPJMD, RKPd, dan Renstra OPD, yang fokus pada sektor unggulan daerah, transformasi ekonomi, pengurangan pengangguran, dan peningkatan investasi lokal.
- Pemda harus fokus pada pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur konektivitas antarwilayah, seperti jalan produksi, pelabuhan, pasar rakyat, dan kawasan industri, guna memperlancar distribusi barang dan jasa serta menumbuhkan pusat-pusat ekonomi baru di daerah

9. KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Secara administrasi, 100% pemerintah daerah telah mengeluarkan kebijakan pembebasan bea PBG dan BPHTB atas tindak lanjut SKB 3 Menteri (Menteri PKP, Menteri Dalam Negeri dan Menteri PUPR). KEMENDAGRI dan KEMENPKP akan melakukan pengawasan terhadap implementasi PBG dan BPHTB gratis di seluruh Indonesia.

Rekomendasi strategis kepada Pemerintah Daerah:

- a) Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) telah meluncurkan layanan pengaduan konsumen perumahan terpadu bernama BENAR-PKP (Bantuan Edukasi dan Asistensi Ramah untuk Pengaduan Konsumen Perumahan). Layanan ini dapat diakses melalui WhatsApp di nomor 0812-88888-911
- b) Diminta kepada Pemerintah Daerah menyampaikan informasi terkait dengan Pembangunan Baru atau Renovasi Rumah bagi masyarakat berupa bantuan yang sumber pembiayaannya baik dari APBD ataupun APBN yang tidak muncul sebagai target unit pada dokumen Sistem Informasi Perencanaan Daerah (SIPD).
- c) Mengimplementasikan pembebasan bea PBG dan BPHTB bagi MBR.
- d) Mengalokasikan anggaran renovasi RTLH bagi daerah yang belum mengalokasikannya dalam APBD 2025.
- e) Mendorong desa untuk mengalokasikan anggaran renovasi RTLH dalam APBDes.
- f) Melaporkan hasil pendataan perumahan Kepada KemenPKP dan Kemendagri

10. SATGAS PANGAN POLRI

- a) Upaya Satgas Pangan Polri dalam pengendalian inflasi:
 - Melaksanakan rapat koordinasi terkait teknis dan sosialisasi penyaluran bantuan pangan dan SPHP beras.

NOTULEN RAPAT (Lanjutan)

- Pembuatan surat telegram terkait jukrah pengawasan dan pengecekan langsung pendistribusian bantuan pangan dan beras SPHP.
 - Satgas pangan pusat dan daerah aktif dalam pengawasan pendistribusian bantuan pangan dan beras SPHP.
 - Selain itu Satgas Pangan Polri juga berperan aktif dalam melakukan pengawasan terhadap proses distribusi bantuan pangan dan beras SPHP (stabilisasi pasokan dan harga pangan). Pengawasan ini bertujuan untuk memastikan bahwa penyaluran bantuan tersebut berjalan tepat sasaran, tepat jumlah dan tepat waktu sehingga beras yang disalurkan benar-benar diterima oleh masyarakat.
- b) Rekomendasi Satgas pangan Polri kepada Pemda yaitu:
- memperkuat pengawasan distribusi komoditas strategis (minyakita, beras bantuan pangan, beras SPHP/stabilisasi pasokan dan harga pangan) agar tidak terjadi penumpukan dan penimbunan di gudang-gudang dengan melibatkan K/L terkait serta satuan kewilayahan untuk menjamin keterjangkauan harga.
 - Agar Satgasda, pemerintah daerah dan instansi terkait, diharapkan terus mengintensifkan kegiatan operasi pasar dan gerakan pangan murah bekerja sama dengan Perum Bulog, mitra resmi koperasi, maupun outlet instansi pemerintah di wilayah masing-masing, guna mendorong percepatan dan pemerataan penyaluran beras SPHP secara masif.
 - Melaksanakan pengawasan ketat terhadap praktik penjualan beras ditingkat produsen, khususnya dalam aspek mutu, takaran dan harga jual, untuk mencegah potensi penyimpangan serta melindungi kepentingan konsumen dan kestabilan pasar.

11. TENTARA NASIONAL INDONESIA

- a) Dalam rangka swasembada pangan, TNI saat ini fokus pada pendampingan luasan tanam hingga bantu Bulog untuk sergab petani periode Feb s/d Agustus 2025.
- b) Sedangkan untuk pengentasan kemiskinan, TNI saat ini tetap melaksanakan program unggulan, diantaranya TMMD, Bhaksos, pendampingan petani & Kementan, bazar murah/UMKM
- c) TNI juga bantu bentuk SPPG & operasional MBG
- d) TNI sudah bangun 55 BTP dan kompi produksi
- e) TNI merekomendasikan agar semua Pemda Prov/Kab/Kota untuk monitor serta bersinergi dengan TNI, Polri dan Komp lain dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional dan pengentasan kemiskinan serta menjaga stabilitas pengendalian inflasi, guna mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik.

NOTULEN RAPAT (Lanjutan)

REKOMENDASI TINDAK LANJUT TPID KOTA BANJARBARU

- 1) Indeks Perkembangan Harga (IPH) kondisi Minggu ke-2 Agustus 2025 di Kota Banjarbaru terjadi Perubahan Harga sebesar 0,16 (inflasi). Komoditas yang menjadi andil perubahan harga terbesar adalah Bawang Merah (0,3429), Telur Ayam Ras (0,0971), dan Cabai Rawit (0,0466). Kedepannya TPID Kota Banjarbaru harus terus menjaga stabilitas harga agar tidak terjadi deflasi terus menerus serta tetap menjaga tingkat inflasi agar tidak melebihi target yang telah ditetapkan pemerintah pusat.
- 2) Agar TPID Kota Banjarbaru melaksanakan 6 upaya konkret secara penuh karena saat ini Kota Banjarbaru hanya melaksanakan beberapa upaya konkret saja.
- 3) Terus melakukan pemantauan harga dan menjaga stok barang agar tetap stabil
- 4) Melakukan rapat koordinasi TPID secara rutin dan berkala
- 5) memastikan komunikasi yang baik antara semua pemangku: pemerintah, BI, BPS, distributor, pedagang, dan petani
- 6) mengadakan pasar murah atau operasi pasar pada saat terjadi lonjakan IPH
- 7) Menggunakan media lokal untuk info harga acuan terbaru, jadwal pasar murah, dan prakiraan IPH
- 8) Guna memperkuat ketahanan & kemandirian pangan, diharapkan Kota Banjarbaru mampu secara mandiri memenuhi kebutuhan/konsumsi, dengan memberdayakan petani, tingkatkan produksi, membangun skala kawasan sentra, membangun sistem logistik serta memperlancar distribusi pasar

Demikian disampaikan dan untuk menjadi bahan selanjutnya.

Pembuat



DIAN YUDHA ASTUTI, SE
NIP. 197803042009012001

FILE FOTO (19 Agustus 2025)



Dokumentasi kegiatan Rakor Inflasi (via zoom meeting) dengan Kemendagri di Aula Srikandi Sekretariat Kota Banjarbaru yang dihadiri oleh TPID Kota Banjarbaru